ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYERAPAN ANGGARAN DALAM APBD KOTA BUKITTINGGI

Kantor Badan Keuangan Bukittinggi

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan Untuk mendapatkan

Gelar Sarjana S-1Akuntansi Syariah

Disusun Oleh

Nesti Sri Wahyuni

Nim:3416.032

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Edit dengan WPS Office

BAB I

PRNDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Efektivitas dan efisiensi sangat diperlukan dalam merealisasikan anggaran daerah. Dengan tingkat efesiensi dan efektivitas yang baik, itu berarti bahwa program-program pemerintah dijalankan sesuau budget awal. Efesiensi dan efektivitas merupakan isu yang umum bagi instansi pemerintah. Banyak istansi pemerintah yang berusaha untuk mencapai kriteria tersebut bukan hal yang mudah. Istansi pemerintah harus merealisasikan budget yang telah di tetapkan. Apabila budget tidak terserap dengan baik maka kriteia efektiv dan efesien tidak akan tercapai.[1]

Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya pemerintah daerah tidak bekerja sendirian, mereka dibantu oleh organuisasi perangkat daerah yang memiliki tugas untuk merealisasikan atau mengimplementasikan rencana kegiatan pemerintah di tahun anggaran atau periode tertentu. Untuk menilai efektivitas atau tidak nya realisasi anggaran maka perlu membandingkan antara dokumen pelaksana anggaran dengan laporan realisasi anggaran. [2]

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 telah menjelaskan bahea laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang terdiri dari gambaran mrngenai pendapatan, belanja, pembiayaan, dan realisasi anggaran selama tahun-tahun periode tertentu. Rralisasi aanggaran tersebut harus dinilai efektivitas dan efisiensinya untuk mengetahu penyerapan APBD.

Setelah dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah,

[1] Harry p.paat, “analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah badan perencanaan penelitian dan pengembangan kota tomohon” Grace b.nngoi analisis efektivitas dan efisiensi .

[2] Mardiasmo, *Otonomi dan manajemen keuangan daerah* (Yogyakarta ANDI,2004),105

Edit dengan WPS Office

pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan kegiatan atau program pemerintah secara mandiri tanpa harus terus menerus bergantung pada negara. Berdaskaran undang-undang No 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa otonomi merupakan suatu hak,wewenang dan kewajiban bagi daerah otonom dalam mengurus serta mengatur urusannya sendiri yang berkaitan dengan pemerintah dengan kepentingan masyarakst didalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Didalam udang-undang tersebut juga dijelaskan pengertian dari daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang dalam mengurus dsasn mengatur uruan pemerintahan serta bagi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat didalam sistem NKRI. Pemerintah daerah di brikan hak dan wewenang dan menjalankan kegiatan secara mandiri yang berdasarkan asas dekosentralisasi, asas pembantu dan desentralisasi.[3]

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama -sama oleh pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerinta daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan dtetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam anggaran pendapatan dan belanja daaerah tergambar semua hak dan kewajibab dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dan berhubungan dengan hak dan kewajibab daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahu.hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran perkembangan kemampuan keuangan daerah selama ini. [4]

pada era reformasi sekarang ini, pengelolaan anggaran pendapatan di tiap-tiap daerah sudah mengalami berbagai perubahan

[3]Ibid -106

[4] Badan Pengelolaan dan Keuangan aset daerah (BPKAD) Kabupaten serang, 2011-2016

Edit dengan WPS Office

regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintahan daerah dapat menciptakan ***good governance*** dan ***clean government*** atau sistem pemerintahan yang bersih serta suatu pemerintahan yang efektif, efisiensi, jujur, transparan, bertanggung jawab. dengan melakukan tata cara kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu didaerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik .

contoh fenomena anggaran pendapatan belanja daerah di Indonesia contohnya di Kota DKI Jakarta tahun 2019 mengalami peningkata, dengan rata-rata peningkatannya pertahun sebesar 74,78 triliun atau 13,2%, dibanding dengan tahun 2018 Rp.66,03 triliun. sedangkan realisasi pendapatan DKI Jakarta tahun 2018 rata-rata pertahun sebesar Rp.61,24 triliun atau 92,7% . jumlah tersebut turun 5,5% dari realisasi pendapatan tahun 2017 yaitu Rp. 64,82 triliun. Setiap tahun anggaran menjadi masalah rutin adalah rendahnya daya serap anggaran. Dalam nota keuangan 2015 disebutkan bahwa daya serap anggaran belanja rata-rata hanya 87% dari penggunaan anggaran yang ditetapkan APBN setiap tahun(Aditya Akhbar : 2018).

Sedangkan Realisasi anggaran Pendapatan yang pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, analisis pembiayaan, tujuan pelaporan realisasi adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting. Belanja daerah

Edit dengan WPS Office

mencerminkan kebijakan pemerintah daerah pembangunan dan penurunan aktiva dan kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi.(Harry Almakka:2015)

Contohnya realisasi anggaran di Indonesia yaitu di daerah sumatera selatan tahun 2017-2019 dilihat bahwa realisasi anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya tidak terserap sepenuhnya masih banyak ditemukan kekurangan yang masih belum mencapai 100% tiap tahunnya, bahkan ada yang tidak mencapai standar ideal laporan realisasi anggaran belanja sebesar 80% pertahunnya. Hal itu terjadi karena keterbatasan pegawai dan aturan yang tidak fleksible. Apabila realisasi anggaran lebih kecil dari anggaran maka dapat diartikan ada sebagian program dan kegiatan yang pelaksanaannya belum selesai atau ada pembatalan pelaksanaan kegiatan. Selisih antara anggaran dan realisasi anggaran belanja terdapat dalam laporan keuangan yang dibuat setiap akir tahun anggaran sebagai pertanggung jawaban keuangan.

Sisa lebih pembiayaan atau (SILPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran, sedangkan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) 01 menyebutkan bahwa SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja,serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Lemahnya APBD dapat mengakibatkan target penerimaan tidak tercapai dan banyaknya program atau kegiatan pemerintah yang tidak terlaksana sehingga menimbulkan SILPA (Ramadhan:2015). di indonesia rata-rata SILPA di pemerintahan daerah pertahun melebihi Rp.50triliyun. jumlah SILPA yang terjadi bukanlah karena semata mata efisiensi pengelolaan belanja daerah, tetapi lebih menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektiv di dalamnya. Salah satunya ada program/kegiatan yang tidak daapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan (Rusita Utari,2014).

Pemerintah daerah dalam mengimplementasikan APBD harus memperhatikan ***Prinsip Value for money***, Prinsip ***Value for money*** dalam

Edit dengan WPS Office

mengukur kinerja pemerintah daerah yakni ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efektif dalam meminimalkan penggunaan sumber daya alam maksimakan hasilnya,serta efektitifitas atau berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dapat dikatakan bahwa APBD memegang peran penting bagi pemerintah daerah, ole karena itu pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan dan pelaksanaan APBD dengan baik (Ferina:2016). menyatakan bahwa jika perencanaan dan pelaksanaan APBD buruk dapat mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan dan tidak terlaksanakannya program dan kegiatan sehingga menghasilkan sisa lebih\kurang peritungan anggaran (SILPA) yang tinggi pada tahun berkenaan. **Contohnya** adanya suatu proyek yang tidak terlaksana sehingga terjadi selisih lebih/kelebihian penerimaan disbanding dengan pengeluaran yang terjadi, maka bisa disimpukan penyerapan kurang efektif. Permasalahan utama yang terjadi adalah rendahnya daya serap anggaran.

Penyerapan Anggaran tidak Efektif tercemin dalam sisa lebih permbiayaan Anggaran (SILPA) didapatkan dari selisih lebih atau kurang realisasi penerimaan atau pendapatan dengan realisasi pengeluaran atau belanja selanjutnya ditambah dengan pembiayaan neto atau selisih dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran embiayaan. Terjadinya SILPA tidak selalu menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah itu baik dalam efisiensi pengelolaan belanja daerah tetapi bisa jadi karena realisasi pengeluaran atau belanja yang lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan yang terjadi karena adanya program atau kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun anggaran yang bersangkutan sehingga anggaran tidak terserat secara maksimal . Oleh karena itu terjadinya SILPA harus di telaah lebih jauh apakah hal tersebut merupakan prestasi atau malah sebaliknya (Ramadhan:2015).[5]dalam islam dipandu oleh kaidah-kaidah Syari'ah dan skala prioritas, sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran

[55] Mohamaad Mahsun*, Pengukuran Kinerja Sektor Publik*(YogyakartaBPFE, 2012), 95

Edit dengan WPS Office

Q.S Al-Isra Ayat 29 sebagai berikut :

اَلْوٰ لْعَجْتَ لَكَدَيِ ةَلْوُلْعَم ىلِاَكِقُنُع اَلْوٰ اَهْطُسْبَتْ

Artinya: Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkan (jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu pemurah) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (Q.S Al-Isra:29).[6]

Pada pemerintahan kota Bukittinggi, Anggaran pendapatan belanja daerah dari tahun ke tahun menurun, tetapi transfer dari pusat tinggi. Hal ini menunjukan bahwa tingkat ketergantungan kota Bukittinggi masih relative kuat terhadap pusat. Kota bukittinggi merupakan salah satu kota yang ada di provinsi sumatera barat dengan berbagai potensi daerah yang cukup besar dalam meningkatkan keuangan daerah di masa datang. Adanya pelaksanaan desentralisasi dalam era otonomi daerah merupakan suatu peningkat efektivitas dan efisiensi sumber-sumber penerimaan daerah dan perencanaan ekonomi daerah atau keuangan daerah yang lebih baik, Dalam penyusunan APBD,pemerintah telah menerapkan paartisipasi setiap satuan kerja dan penyusunan masing-masing yang memuat rencana kerja anggaran atau bisa disebut (RKA). Masing-masing telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah memuat sasaran dari anggaran itu sendiri.

Realisasi Anggaran daerah kota bukittinggi tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,dengan masih sangat besar ketergantungan terhadap sumber pendapatan daerah. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode tahun 2017 dan tahun 2018 . dan secara nominan pendapatan pemerintah daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah kota bukittinggi terus berusaha untuk meningkatkan anggaran pendapatan belanja daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah .

[6] Surat Al-Isra Ayat 29.

Edit dengan WPS Office

Berikut di bawah ini tabel data anggaran pendapatan belanja daerah dan realisasi pendapatan Kota Bukittinggi.

Tabel 1.1

Data anggaran pendapatan belanja daerah dan Realisasi pendapatan Kota Bukittinggi tahun 2015-2019

TAHUN	PENDAPATAN		SELISIH(%)
	Anggaran	Realisasi	
2015	611.264.389.203.00	593.323.296.014.34	17.941.093.188,66(97,06)
2016	675.267.277.741.89	647.045.721.855.85	28.221.555.886,04(95,82)
2017	710.125.538.263.16	653.374.887.189.69	56.750.651.073,47(92,01)
2018	720.174.380.033.00	695.592.067.770.61	24.582.312.262,39(96,59)
2019	1.343.286.330.715	1.172.935.640.338	170.350.690.437(87,31)

Sumber : Kantor Badan Keuangan Daerah Bukittinggi tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.1 laporan anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2015-2019 Wako ramlan sampaikan bahwa pada sektor pendapatan yang tertinggi dari target yang dianggarkan dan di realisasiskan adalah tahun 2019 sebesar Rp.98,00% dan terendah tahun 2017 sebesar Rp.92,01%.

Tabel 1.2

TAHUN	BELANJA DAERAH/TRANSFER		SELISIH (%)
	Anggaran	Realisasi	
2015	686.497.094.334.48	579.515.283.167.49	106.981.811.166,99(84,42)
2016	740.530.417.595.22	631.173.276.618.00	109.357.140.977,22(85,23)

Edit dengan WPS Office

2017	733.419.320.634.34	590.688.023.803.65	142.803.285.830,69(80,53)
2018	839.898.354.079.22	705.251.103.983.95	134.647.250.095,27(83,97)
2019	891.197.754.148.88	717.087.566.902.83	174.110.187.246,05(80,46)

Sumber : Kantor Badan Keuangan Daerah Bukittinggi tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.2 laporan anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2015-2019 Wako ramlan sampaikan bahwa pada sektor Belanja Daerah/Transfer yang tertinggi dari target yang dianggarkan dan di realisasiskan adalah tahun 2016 sebesar Rp.85,23% dan terendah tahun 2019 sebesar Rp.80,46%.

Tabel 1.3

TAHUN	PEMBIAYAAN DAERAH		SELISIH (%)
	Anggaran	Realisasi	
2015	75.232.705.131.48	75.060.344.066..48	172.361.065,00(99,77)
2016	65.263.139.853.33	65.263.139.853.33	0,00 %
2017	23.365.782.71.18	22..446.424.662.18	919.357.709,00(96,07)
2018	119.723.947.046.22	105.574.316.787.22	14.149.657.259,00(88,18)
2019	142.142.723.668.88	97.049.480.755.88	45.093.242.913,00(68,28)

Sumber : Kantor Badan Keuangan Daerah Bukittinggi tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.3 laporan anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2015-2019 Wako ramlan sampaikan bahwa pada sektor Pembiayaan yang tertinggi dari target yang dianggarkan dan di realisasiskan adalah tahun 2015 sebesar Rp.99,77% dan terendah tahun 2016 sebesar Rp.0,00%.

Secara keseluruhan pelaksanaan APBD tahun 2015-2019 menghasilkan sisa lebih pembiayaan SILPA yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.88.868.356.913,33 tahun 2016 Rp.811.135.585.091.18 tahun 2017 Rp. 85.133.277.048,22 tahun 2018 Rp.95.915.280.573.88 dan tahun 2019 sebesar Rp.114.068.610.749.10.

Edit dengan WPS Office

Pemerintah kota bukittinggi terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan belanja daerah dan realisasi pendapatan untuk pembangunan daerahnya dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah, dilihat dari beberapa aspek yaitu mampu memanfaatkan potensi daerahnya dengan salah satu cara melalui pemanfaatan semaksimal mungkin atas sumber daya daerah, sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kinerja keuangan daerah.

Dalam penelitian ini menggunakan rasio efektivitas anggaran, rasio efesiensi anggaran, rasio efektivitas menggambarkan perbandingan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan, dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah (Suprapto, 2008). Apabila realisasi penerimaan pendapatan daerah semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran pendapatan daerah, maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pendapatan daerah semakin efektiv. Rasio efisien anggaran menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan engan realisasi pendapatan yang diterima. (Halim, 2004:287) kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Oleh karena itu penulis tertarik menggunakan dua rasio tersebut yang merupakan bagian dari rasio keuangan dalam menillai kinerja keuangan pendapatan belanja daerah kota bukittinggi.[7]

Dari penjelasan yang penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang " ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYERAPAN ANGGARAN DALAM APBD KOTA BUKITTINGGI " TAHUN (2015-2019)

[7]

Edit dengan WPS Office

B.Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan terbatas pada Analisis efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran terhadap APBD Kota Bukittinggi berdasarkan rekapitulasi tahun 20015-2019.

C.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, Bagaimana efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran dalam APBD di Kota Bukittinggi tahun 2015-2019 ?

D.Tujuan penelitian

tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas dan tingkat efisiensi penyerapan Anggaran dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bukittinggi .

E.Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. bagi pihak pemerintah Kota Bukittinggi

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan untuk perkembangan kinerja pemerintahan dalam segi pendapatan serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang di perlukan.

b. bagi masyarakat umum

dengan memberikan hasil yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, maka masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan

Edit dengan WPS Office

yang meningkat.

c. bagi dunia akademik

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

d. bagi penulis

penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan mengenai keuangan pendapatan daerah serta syarat penyelesaian S1 pada jurusan Akuntansi Syariah IAIN Bukittinggi.

F.Penelitian Terdahulu

Alful Laila Rosyidah Noor Shofwah 2016 dengan Jurnal "Analisis Realisasi Anggaran untuk menilai efektivitas dan Efisiensi kinerja instansi pemerintah " untuk tingkat efektivitas pada tahun 2016-2018 seluruhnya dalam kategori efektif karena hasilnya pencapaiannya tingkat efektiv nya lebih dari 90%, hal ini dapat dikatakan baik dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Miftahul Hasanah 2015 dengan Jurnal " Analisis belanja Daerah kota Bengkulu tahun 2014-2017 (tinjauan efisiensi dan efektivitas)" hasil analisis efisiensi belanja pemerintah rata-rata perhitungan tingkat efisien secara keseluruhan adalah 98% hal ini menunjukan bahwa tingkat efisien masih rendah karena hasil yang didapat lebih dari 80% dan hasi efektivitas belanja pemerintah kota Bengkulu sebesar 93% dan sudah efektiv .

Murdani, Ade Suherlan 2014 dengan Jurnal "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Dalam APBD Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2008-2012" ini menunjukan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran bidang pendidikan dinilai tidak efektif. Tingkat efisien anggaran pendidikan dalam kategori kurang efisien. Tingkat efektivitas anggaran bidang kesehatan secara rata-rata kurang efektif. Dan kurang efisien.

Edit dengan WPS Office

Wahyu Heri Prasetyo 2015 dengan judul penelitian " Analisis Anggaran belanja dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi penyerapan Anggaran belanja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota magelang " Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil magelang berfariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 93% dengan kategori efektif. Tingkat efektif terendah dengan presentase 76,91% (kurang efektif).

Joao Amaral 2013 dengan judul penelitian " Efektivitas dan efisiensi Penyerapan Anggaran pada Ministerio dan obras publicas timor leste " Hasil penelitian ini menujukan rata-rata anggaran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar 89,29% dengan tingkat presentase 80% s/d 90% atau terkategori sangat cukup efektivitas. Dan hasilnya Baik.

Lailatul Nuzulah 2016 dengan judul Penelitian " Analisis Efisiensi dan Efektivitas realisasi anggaran belanja langsung bidang TK/Sd pada dinas pendidikan kabupaten Lumajang " Hasil penelitian ini adalah menunjukan bajwa untuk tungkat efektivitas selama tahun 2015-2016 secara keseluruhan rata-rata pada kriteria yang efekti. Hal ini mnunjukan bahwa pengelolaan keuangan bidang tk/sd sudah cukup baik. Sedangkan untuk tingkat efisiensi pada tahun 2015 sampai 2016 berada pada kategori kurang efisien.[8]

G.Penjelasan Judul

Agar lebih mudah dalam pemahaman penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan judul penelitian , yang mana penjelasannya adalah sebagai berikut ;

Efektivitas ;

Pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative dan pemeliharaan cara dan menentukan

[8]

Edit dengan WPS Office

pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah di tentukan. Efektifitas secara umum menunjukan sampai berapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Efisiensi ;

Menggambarkan rasio atau perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan output yang dihasilkan. Efisiensi merupakan perbandingan antara outpun dan input yakni perbandingan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya input yang digunakan. Dalam penelitian ini input adalah dana atau belanja yang tertuang dalam kecamatan sedangkan outout digunakan dua indikator yaitu realisasi pendapatan oada setiap kecamatan dan pelayanan publik yang diindikasikan dengan banyaknya jumlah penduduk di setiap kecamatan.

Anggaran :

Suatu perkiraan atau estimasi atas penerimaan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan untuk melayani aktivitas yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang .dan anggaran dapat diinterprestasikan sebagai paket pertanyaan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yg akan datang.

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) :

Semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun Anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (Operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak tersangka.[9]

H.Sistematika Penulisan

[9] Harry p.paat, “analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah badan perencanaan penelitian dan pengembangan kota tomohon” Grace b.nngoi analisis efektivitas dan efisiensi .

Edit dengan WPS Office

Sistematika penulisan Skripsi ini disusun atas lima bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang, perumusan masalah,tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang dasar-dasar teori yang terkait dengan konsep yang diangkat, yaitu mengenai landasan teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokal dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, deferensi operasional dan variable, teknik pengimpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian di analisis dengan berbagai metode untuk dapat membuktikan kebenaran yang telah dibuat agar dapat menarik kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran bagi penelitian yang telah dilakukan peneliti.

Edit dengan WPS Office

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Landasan Teori

1. Efektivitas Anggaran

1.1 Pengertian efektifitas Anggaran

Menurut mardiasmon (2009) efekttivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran (0A) dengan output realisasi (OS), jika OA>OS disebut efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apapun yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah di anggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas atau tidaknya pekerjaan tersebut dapat dilihat dari pencapaian atau hasil dari pekerjaan tersebut.

Menurut Mahmudi (2011:22) efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan drngan

Edit dengan WPS Office

pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dan keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditrntukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya mengukur outcome.

1.2 Kriteria untuk mengukur efektivitas Anggaran

Adapun kriteria untuk mengukur efektifititas suatu organisasi dengan tiga pendekatan yang dapat digunakan sepertinya dikemukakan masruri (2014) yaitu :

a.Pendekatan sumber *(**resource approach***) yaitu mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

a.Pendekatan Proses (***process approach***) yaitu untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

b.Pendekatan sasaran *(**goals approach**)* dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil *(**Output***) yang sesuai dengan rencana.

Menurut Mahsun dalam sumenge (2013) tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja, adapun rumusannya yaitu ;

a. Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi AnggaranBelanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}}$ x 100%

Edit dengan WPS Office

Keterangan :

Kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut :

a.Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.

a.Jika hasil pencapaian antara 90% - 100% maka anggaran belanja dikatakan efektif.

b.Jika hasil pencapaian antara 80% - 90% maka anggaran belanja dikatakan efektiv.

c.Jika hasil pencapaian antara 60% - 80% maka anggaran belanja dikatakan kurang efektiv.

a.Jika hasil pencapaiannya dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Berikut tabel tingkat efektivitas anggaran daerah :

%Rasio efektivitas	Tingkat efektivitas
>100%	Efektif
=100%	Berimbang
<100%	Tidak efektif

Apabila realisasi penerimaan pendapatan asli daerah semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran pendapatan asli daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan semakin efektif. Sedangkan apabila realisasi penerimaan pendapatan asli daerah semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut maka dapat disimpulkan

Edit dengan WPS Office

bahwa pemungutanpendapatan daerah kurang efektiv.[10]

2.Efisiensi Anggaran

2.1. Pengertian Efesiensi Anggaran

Efisien adalah rasio yang menunjukan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara outout dan input. Menurut Raharjo (2011:169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara sitematis, efisien merupakan perbandingan antara output dan input atau dengan istilah lain outpu per unit input.

Pengukuran efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung rasio efisiensi keuangan daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah (Halim,2007).

$$\text{Rasio efisiensi } E = \frac{\Sigma^{n}_{i=1} (PAKi \times CKi - RAKi) \times 100\%}{\Sigma^{n}_{i=1} (PAKi \times CKi)}$$

E : Efesiensi

PAKi : Anggaran Keluar i

RAki : Realisasi Anggaran keluar i

CKi : Capaian Keluar i

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah menurut Kopmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 yaitu : lebih dari 100% tidak efisien : antara 90%-100% kurang efisien antara 80%-90% cukup efisien antara 60%-80% dibawah 60% sangat efisien. Berdasarkan rumusan tersebut penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil

10

Edit dengan WPS Office

perhitungan dibawah 60%. Karena efisiensi di ukur dengan perbandingan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :

a.Meningkatkan output dengan pada tingkat input yang sama.

b.Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari padas proporsi peningkatan input.

a.Menurunkan input pada tingkat ouput yang sama

Menurunkan input didalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.[11]

%rasio efisiensi	Tingkat efisiensi
>100%	Tidak efisiensi
90%-100%	Kurang efisiensi
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat efisien

Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, aoabila rasio yang dicapai kurang dari 1(satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi mengidikasikan

Edit dengan WPS Office

bahwa kinerja pemerintah semakin baik. Dan sebaliknya, semakin besar rasio efisiensi mengidikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin buruk.

3.Anggaran

3.1.Pengertian Anggaran

Secara umum anggaran dapat diartikan sebagai suatu perkiraan atau estimasi atas penerimaan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan untuk melayani aktivitas yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Anggaran menurut bastian dalam silalhi (2012) dapat diinterprestasikan sebagai paket pertanyaan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yg diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan datang.

3.2.Fungsi dan Manfaat Anggaran

Secara umum, anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, anggaran dapat di interprestasikan sebagai paket peryataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran. Fungsi anggaran menurut Muchlis dan Bathtiar (2002) :

a.Sebagai pedoman pengelolaan negara, anggaran mengambarkan rencana dan pedoman pelaksanaan didalam penyelenggaraan negara dalam satu periode tertentu. Adanya anggaran tersebut pemerintah dapat mengukur kemampuan keuangan untuk membiayai pembangunan.

b.sebagai alat prioritas, jumlah pendapatan sangat terbatas sementara jumlah belanja terus meningkat. Untuk itu pemerintah harus membuat skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dari belanja negara tersebut dengan mendahulukan belanja sangat diperlukan dan mengurangi atau bahkan menghapus anggaran belanja yang tidak perlu, demgan kata lain para pengguna anggaran diharuskan berhemat dan efisien dalam hal belanja negara.

Edit dengan WPS Office

c.Sebagai alat negoisasi politik, adanya sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah merupakan sarana negoisasi politik dengan parlemen yang terdiri dari berbagsi partai politik dengan tujuan yang berbeda.

d.Sebagai alat perencanaan Anggaran digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ***(public welfare***) dengan jalan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan ***(annual budget).***

d.Sebagai alat pengendalian Anggaran digunakan sebagai alat pengendalian yang efektif, sehingga harus dilakukan secara melekat ***(bult in control)*** dalam tubuh organisasi atas berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.

e.Sebagai alat evaluasi kinerja setiap pelaksanaan dapat diukur dan dievaluasi secara periodic maupun insedentil, yaitu :

a.Apakah sudah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran ;

b. Apakah tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan;

c.Apakah sudah dilaksanakan secara efesien dan efektif berdasarkan pembanding yang sejenis.

3.3.karakteristik Anggaran

karakteristik anggaran sektor public yaitu :

a.Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan situasi nin keuangan.

b.Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu satu atau beberapa tahun.

Edit dengan WPS Office

c.Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

d.Usulan anggaran ditetapkan dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih dari penyusunan anggaran.

e.Sekali disusun, anggaran hanya dapat dirubah dalam kondisi tertentu. Karakteristik anggaran yang baik, yaitu :

a.Berdasarkan program.

b.Berdasarkan pusat pertanggung jawaban pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi.

c.Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

3.4.Jenis Sistem Penganggaran[12]

Sitem penganggaran menurut batian (2006), ada 5 lima yaitu :

a.Line item budgeting

Line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang dilaksanakan kepada dan dari mana ia berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan .

Karakteristi dari sistem ***line item*** **:**

a.Titik berat perhatian pada segi pelaksanaan dan pengawasan.

b.Penekana hanya pada segi administrasi.

c.Penyusunan relative mudah.

d.Mambantu dalam mengamankan komitmen komitmen di antara partisipasi sehingga dapat mengurangi konflik.

Kelemahannya :

12

Edit dengan WPS Office

a. Perjatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat kurang pertimbangan.

b. Diabaikannya prestasi yang dicapai atas realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan.

c. Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.

b.Incremental budgeting

Sistem ini menggunakan revisi anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan untuk menentukan anggaran tahun yang akan datang. Sekali suatu pos pengeluaran muncul didalam anggaran, maka selamanya pos tersebut ada pada anggaran perode berikutnya dengan perubahan / kenaikan yang didasarkan dari jumlah yang di anggarkan pada periode sebelumnya.

Titik perhatian adalah marginal atau selisih incremental antara anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya bukan pada anggaran secara menyeluruh. Alasan diterapkannya sistem anggaran incremental ini adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sebelumnya merupakan kegiatan yang harus diteruskan pada tahun berikutnya ;

a. Membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran.

b. Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program program baru.

c. Dapat mengurangi konflik, kelemahan sama dengan sistem anggaran *line item*.

c.*Planning programing budgeting system* (PPBS)

Adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang terikat dalam suatu sistem sebagai suatu

Edit dengan WPS Office

kesatuan yang bulat dan tidak terpisah pisah dan didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan dan proses pertimbangan implikasi keoutusan terhadap berbagai kegiatan yang akan datang.

Keunggulannya :

a. Dapat menggambarkan tujuan organisasi dengan lebih nyata.
b. Dapat menghindarkan adanya *overlapping* program dan pertentangan diantara program.
c. Dapat memungkinkan alokasi sumber daya secara lebih efisien dan efektif berdasarkan analisis manfaat dan biaya untuk mencapai tujuan.

Kelemahannya :

a. Terlalu sulit diterapkan baik secara teknis maupun praktis sehingga silit diterapkan khususnya di negara negara berkembang.
b. Merupakan proses yang multikompleks dan memerlukan banyak perhitungan dan analisa.
c. Memerlukan kualitas pengelolaan yang sangat tinggi.

d.Zero based budgenting

Merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan suatu yang sedaang dilakukan dan tidak berdasarkan pada apa-apa yang telah dilakukan dan tidak berdasarkan pada apa yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan dilihat sebagai sesuatu yang mandiri dan bukan merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan.

Keunggulan :

a. Proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin

Edit dengan WPS Office

tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi kepentingan manajemen.

b. Dana dapat dialokasikan dengan lebih efesien, karena terdapat beberapa alternative keputusan dan alternative bagi pelaksana keputusan tersebut.

c. Setiap program dan kegiatan selalu direviuw setiap tahun.

d. Pengambilan keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang dianggap kritik dan mendesak.

Kelemahan :

a. Tidak mudah untuk diterapkan.

b. Tidak semua kegiatan dapat disusun rangking keputusannya secara konsisten dari tahun ke tahun.

c. Terlalu mahal dan memakan banyak waktu.

d. Memerlukan skill khusus terutama dalam menganalisa dan menentukan prioritas/rangking.

e. Memerlukan data yang lebih banyak dan diperlukan dukungan analisa yang cukup kuat.

f. Sulit memutuskan bahwa kegiatan yang satu benar-benar lebih penting dibandingkan kegiatan yang lain.

e.*performance budgeting system*.

Cara penyusun anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dan yang berorientasi kepada penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimis dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusun ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja tetapi juga didasarkan kepada tujuan atau rencana-rencana yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau dukung oleh suatu anggaran biaya

Edit dengan WPS Office

yang/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efesien.

Keunggulan :

a. Memungkinkan adanya utusan dalam wewenang pengambilan keputusan.

b. Merangsang partisipasi dan motivasi unit-unit operasional melalui proses usulan dari bawah dan penilaian anggaran yang bersifat factual.

c. Dapat membantu meningkatkan funfsi perencanaan dan mempertajam keputusan pada semua tingkat.

d. Memungkinkan alokasi dana secara optimal karena setiap kegiatan selalu dipertimbangkan dari segi efisien.

e. Dapat menghindari pemborosan.

Kelemahan :

a. Tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan.

b. Tidak semua hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.

c. Tidak ada kejelasan mengenai siapa pengambilan keputusan dan siapa yang menanggung beban atas keputusan.

5.Keuntungan dan kelemahan anggaran

a.Keuntungan Anggaran

Sistem anggaran memiliki biaya dan memerlukan pengorbanan tetapi dibalik pengorbanan itu banyak keuntungan. Keuntungan anggaran antara lain :

a. Mempercepat dan mengefisiensikan pencapaian tugas.

b. Mengurangi tugas-tugas rutin operasional pimpinan sehingga ia

Edit dengan WPS Office

lebih terfokus kepada hal-hal yang bersifat jangka panjang dari strategis.

c. Meningkatkan daya kopentensi, motivasi, dan menimbulkan proses penilaian yang lebih objeltif.

d. Dapat menilai kemajuan kerja (progress) pencapaian tujuan.

e. Dapat mengetahui lebih dini setiap penyimpanan dari tujuan.

f. Dapat membedakan antara yang efisien dan yang tidak efisien.

g. Mengurangi hal-hal yang bersifat kabur.

h. Dapat memantapkan pelaksanaan manajemen, pengawasan, akuntasi secara lebih naik.

i. Dapat mengarahkan kegiatan kebidang yang lebih menguntungkan.

j. Dapat menilai prestasi karyawan atau bagian yang lebih objek.

b.Kelemahan Anggaran

Meskipun begitu banyak keuntungan yang diperoleh dengan menyusun anggaran, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

a. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan sungguh-sungguh.

b. Anggaran hanya merupakan suatu Alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya.

c. Kondisi yang terjadi tidak selalu serratus persen sama dengan yang diramalkan sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang luwes.

Edit dengan WPS Office

d. Anggaran harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. (Prawironegoro,2010)[13]

4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

4.1.Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sarana atau alat untuk dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan Pemerintah Daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah Daerah. Sebagai instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otoritasa pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kenerja, alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo,2002).

5.Realisasi Anggaran

5.1. Manfaatnya

a.Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.

b.Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara kompraharatif.

Laporan reralisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada

13

Edit dengan WPS Office

para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efektiv, efesien, dan hemat, dan telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran APBD, dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.Anggaran Sektor Publik

6.1.Pengertian anggaran sektor publik

Merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat dan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut .

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu ;

a. anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, meningkatlan kualitas hidup masyarakat.

b. anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

c. anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

6.2. Kriteria Anggaran Sektor public yaitu :

a. merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat.

b. menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.

6.3.Fungsi Anggaran Sektor Publik yaitu ;

Edit dengan WPS Office

a. sebagai alat perencana

Sebagai alat perencana, sektor public merupakan alat yang digunakan untuk melakukan berbagai perencanaan seperti perumusan tujuan di kebijakan,program,aktivitas, alokasi dana dan sumber pembiayaan, serta indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

b. alat pengendalian

anggaran sektor public berfungsi sebagai instrument yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran, berdasarkan anggaran yang diajukan pemerintah menyajikan rencana detail tentang sama penerimaan dan pengeluaran yang harus di pertanggung jawabkan kepada public.

c. alat kebijakan fiskal.

Digunakan sebagai instrument yang dapat mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi, yang akan mendorong memfasilitasi,dan mengkordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. alat politik.

Merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan kesepakatan pihak eksekutif dan legislative atas penggunaan dana public.

e. alat koordinasi dan komunikasi.

Agar sektor public berfungsi untuk alat komunikasi antara unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

f. alat penilaian kinerja.

Merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pemegang anggaran, kepada pihak legislative sebagai pemberi wewenang, kinerja pihak eksekutif sebagai manajer public dinilai berdasarkan

Edit dengan WPS Office

pencapaian target anggaran dan efisien pelaksanaan anggaran.

g. alat motivasi dan alat menciptakan ruang publik.

Merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari kelompok masyarakat, baik kelompok masyarakat yang terogranisis maupun yang tidak terirganisis.

Anggaran merupakan alat perencana untuk mencapai tujuan . perencanaan digunakan untuk :

a. merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

b. merencanakan berbagi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.

c. mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun dan menentukan indikatir kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending atau secara berlebihan, pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan :

a. membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.

b. menghitung selisih anggaran.

c. menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varian.

d. merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui

Edit dengan WPS Office

anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.

Anggaran sebagai alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran public juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

Anggaran sebagai Alat Penilian kinerja

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan beberapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaranyang telah ditetapkan.

Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis,efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh cabinet, birokrat, dan DPR/DPRD,masyarakat,perguruantinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

a. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Contoh :

Edit dengan WPS Office

belanja rutin.

b. Anggaran modal digunakan untuk menunjukan rencana jangka panjang dan pebelanjaan atau aktiva tetap seperti gedung, kendaraan, dll . contoh : belanja investasi/modal.

Proses Penyusunan Anggaran sektor public

Mempunyai 4 tujuan :

a. membantu pemerintahan mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.

b. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa public melalui proses pemrioritaskan.

c.memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

d. meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Proses penyusunan Anggaran Sektor Publik

Faktor Dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah ;

a. tujuan dan target yang hendak dicapai.

b. ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki

pemerintah).

c. waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.

d. faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktusi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya.

Prinsip pokok dalam siklus Anggaran

Edit dengan WPS Office

a.Tahap persiapan anggaran

dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Faktor tingkat ke tidak pastian yang cukup tinggi juga perlu menjadi perhatian.

b.Tahap ratifikasi Anggaran

tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Dalam tahap ini eksekutif di tuntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus memiliki political skill. Yang memadai dari integritas serta persiapan mental yang memadai dari pimpinan eksekutif sangat penting dalam tahap ini.

c. Tahap pelaksanaan Anggaran

hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh manager keuangan public adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

d. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

tahap ini adalah tahap akir dari siklus penganggaran, pada tahap ini anggaran di pertanggung jawabkan dalam bentuk laporan dan evaluasi pelaksanaannya.

7. Kajian Teori yang di Gunakan Menurut Prespektif Islam

Abu Ubaid berpendapat bahwa pemerintahan/negara begitu besar dalam perekonomian, karena tugas pemerintahan adalah menegakkan kehidupan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial.

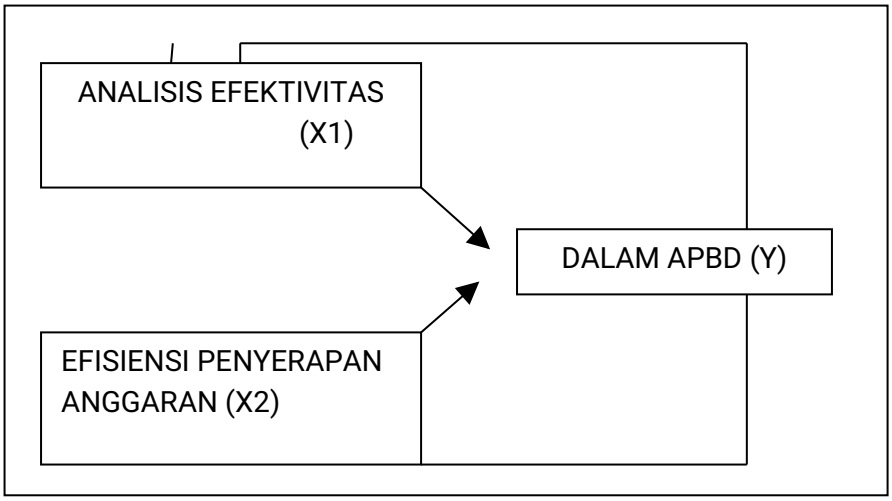
Menurut M Umar Chapra, efektivitas dan efisiensi merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam ajaran islam tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala

Edit dengan WPS Office

perioritas. [14]

8. Kerangka Pemikiran

gambar 2.1



Sumber : kerangka pemikiran penulis

Berdasarkan teori-teori yang telah digunakan, maka dapat disusun kerangka pemikiran berbagai faktor atau variable yang telah dikenali sebagai masalah penting yang merupakan salah satu timbulnya masalah, kerangka konseptual ini memberikan gambaran atau langkah-langkah yang akan peneliti lakukan untuk mengambil kesimpulan.

14

Edit dengan WPS Office

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup Penelitian adalah suatu batasan untuk studi yang menjelaskan fokus studi agar tidak melebar dan menghindari analisis serta pembahasan yang terlalu luas. Dalam penelitian ini agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari judul yang ada, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b.Jenis penelitian dan desain penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2012:11). Penelitian deskriptif itu

Edit dengan WPS Office

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik suatu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain.

c.Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam ukuran angka untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang sudah rinci dalam variabel secara kuantitatif. Jenis data kuantitatif yg digunakan dalam penelitian ini berupa laporan realisasi Anggaran Kota Bukittinggi 2015-2019

Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder . data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data di publikasikan kepada masyarakat. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen,informasi,website ataupun instansi terkait.

d.Teknis pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi stabdar data yang di tetapkan. Adapun teknik data yang digunakan penulis adala sebagai berikut :

Edit dengan WPS Office

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.

.

2. Kepustakaan

Mengumpulkan bahan penelitian dengan melakukan studi kepustakaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

e.Teknik Analisis Data

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. teknik analisis kuantitatif, yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, atau gambar.

2. Analisis Kuantitatif, yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu digunakan untuk menganalisis pelaksanaan anggaran belanja dengan pengukuran efektifitas dan efisiensi.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka,tabel dan uraian penjelasan pengukuran pelaksanaan anggaran belanja dengan menggunakan pengukuran efektivitas dan efisiensi pada anggaran dan realisasi pendapatan belanja daerah tahun

Edit dengan WPS Office

2015-2019 di kantor keuangan kota bukittinggi.[15]

f.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Keuangan Kota Bukittinggi, penelitian dimulai agustus 2020 sampai selesai.[16]

15

16

Edit dengan WPS Office

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Institusi

a. Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya paket UU.No. 22 tahun 1999 telah diubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan telah menimbulkan dampak perusahaan pada sejumlah bidang. Salah satunya adalah perubahan paradigm dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dimana perubahan ditandai dengan terbitnya berbagai peraturan pengelolaan keuangan seperti UU. No. 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara, UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, peraturan pemerintah No. 58

Edit dengan WPS Office

tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah[17].

Untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut, maka berdasarkan peraturan pemerintah No. 28 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten /kota dan peraturan pemerintah No. 14 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kota bukittinggi terhitung januari 2009 bergabung dengan bagian keuangan dan aset daerah sehingga menjadi pengelola keuangan dan aset daerah kota bukittinggi.

Dinas pengelola keuangan dan aset daerah kota bukittinggi terletak di bukittinggi tepatnya dilapangan kantin di jalan jendral sudirman No.27-29 belakang balok bukittinggi 26136 Telp.0752-32485-7028932-625740 fax.0752625448. Berdasarkan peraturan daerah Nomor 12 tahun 2008 terhitung tanggal 1 januari 2009 telah ditetapkan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah dinas pendapatan, bagian keuangan dan salah satu sub. Bagian yang ada pada bagian perlengkapan sekretariat daerah.

Fungsi dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bukittinggi untuk tahun 2009 menjadi dua fungsi yaitu sebagai satuan kerja perangkat daerah. Adapun tugas-tugas pokok dari dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah ini antara lain adalah mengelola seluruh pendapatan daerah, penatausahaan keuangan daerah sekaligus melakukan penatausahaan terhadap seluruh aset pemerintah daerah kota bukittinggi.

b. Visi Dan Misi Badan Keuangan Kota Bukittinggi

1) Visi

Visi merupakan pandangan pandangan kedepan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Adapun visi dari badan keuangan kota

[17] http Rencana Strategi Badan Keuangan 2016-2021

Edit dengan WPS Office

bukittinggi adalah “optimalkan pengelola keuangan dan aset daerah kota bukittinggi secara profesional, transparan dan akuntabel”.

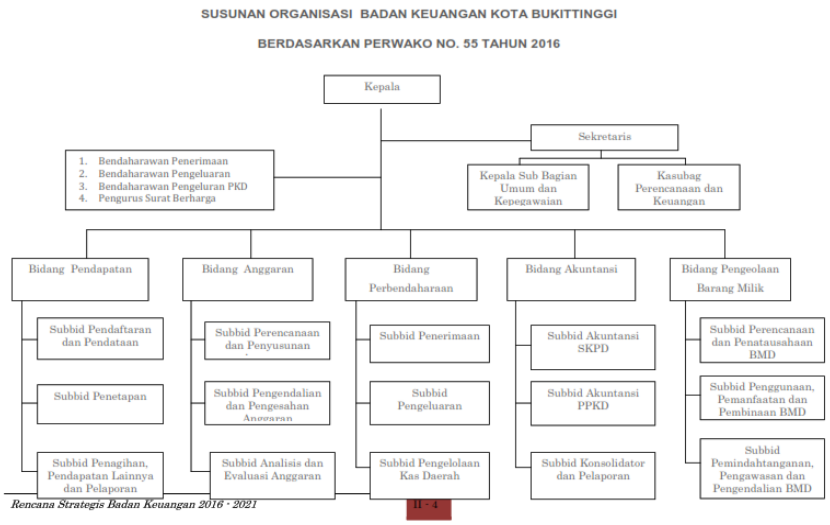
2) Misi

Adapun misi dari badan keuangan kota bukittinggi untuk mewujudkan misi yang dimiliki sebagai berikut:

a. Meningkatkan manajemen pengelola keuangan dan aset daerah.
b. Meningkatkan kualitas dari aparatur pelaksanakan yang profesional dengan dijiwai oleh imam dan taqwa.
c. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah.
d. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal, ekonomis,efektif,efisien,akuntabel dan transparan.
e. Meningkatkan pelayanan prima.

c. Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Edit dengan WPS Office



Rencana Strategis Badan Keuangan 2016 - 2021

II - 4

d. Devisi Kerja

Bidang pengelolaan barang milik daerah (BMD) mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan dan pedoman pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pengendalian.

Bidang pengelolaan milik daerah terdiri dari :

1. Sub. Bidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
2. Sub. Bidang pemindah tanganan dan pengapusan barang milik daerah.
3. Sub Bidang evaluasi dan pelaporan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusun program dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pengelolaan aset daerah.
2. pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah dan pemberian ijin pemakaian aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyusunan perumusan kebijakan serta petunjuk

Edit dengan WPS Office

pelaksanaan di bidang perusahaan,inventaris,pengamanan,penggunaan,pemanfaatan,perubahan status hukum dan tuntunan ganti rugi serta pengendalian aset daerah.

4. pelaksaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah.

5.Pemantauan pelaksanaan program dan administrasi pengelolaan aset daerah.

6.Pengumpulan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pengelolaan aset daerah.

7.Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala badan.

a. Sub Bidang Perencanaan Dan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kepala sub bidang perencanaan dan penatausahaan milik daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka menyusun program penyelenggaraan, perencanaan, dan penatausahaan, barang milik daerah tugasnya antara lain :

1. Pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan dan informasi sehubungan dengan tugas perencanaan penata usaha barang milik daerah.
2. Penyiapan rumusan kebijakan sebagai landasan kerja tugas perencanaan dan penata usaha barang milik daerah.
3. Penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi perencanaan dan penata usahaan sesuai dengan program dan urusan dengan mempedomani rencana strategi badan.
4. Pengumpulan data dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan seksi perencanaan dan penata usahaan.
5. Perencanaan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
6. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan barang milik

Edit dengan WPS Office

daerah sementara dan tahunan.

7. Pelaksanaan inventasi atau sensus barang milik daerah.

8. pelaksanaan koordinasi dan penilaian barang milik daerah.

9. Pelaksanaan koordinasi dan penghimpun pengadaan barang milik daerah.

10. Pelaksanaan koordinasi dan melaksanakan penyusutan/ depresiasi barang milik daerah.

11. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan barang milik daerah berbasis teknologi informasi.

b. Sub bidang Penggunaan,Pemanfaatan dan pembinaan barabg milik daerah

Sub bidang penggunaan, pemanfaatan dan pembinaan barang milik daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan pengolahan bahan dalam rangka menyusun program penyelenggaraan pengguna, pemanfaatan dan pembinaan barang milik daerah, meliputi pengguna, pemanfaatan, mutase antar pengguna barang, pembinaan pengelolaan barang milik daerah, serta pengerlolaan ruma negara milik pemerintah kota bukittinggi.

1. Penghimpunan, pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan urusan pengguna barang, pemanfaatan dan pembinaan barang milik daerah.
2. Pelaksanaan rumusan kebijakan sebagai landasan kerja tugas pengguna, pemanfaatan dan penggunaan serta pengelolaan rumah negara milik daerah.
3. Penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi pengguna, pemanfaatan dan pembinaan sesuai dengan program dan urusan dengan mempedomani rencana strategi badan keuangan.
4. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan seksi penggunaan, pemanfaatan dan pembinaan.
5. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan penetapan status

Edit dengan WPS Office

penggunaan barang milik daerah.

6. Pelaksaan koordinasi perpindahan (mutase) barang milik daerah antar pengguna barang.

7. Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

8. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan rumah negara milik negara.

9. Pelaksanaan penyiapan program pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

10. Pelaksanaan tugas oenunjang dan tugas yang bersifat rutinitas.

c. Sub bidang pemindahtanganan, Pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah.

Sub bidang pemindah tanganan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka menyusun program penyelenggaraan pemindah tanganan, pengawasan dan pengendalian intern barang milik daerah fungsinya antara lain :

1 .Penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas memindah tanganan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

2.Penyiapan rumusan kebijakan sebagai landasan kerja tugas pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

3. Penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi pemindah tanganan, pengawasan dan pengendalian.

4. Pengumpulan data dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan seksi pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian.

5. Pelaksanaan koordinasi dan pengaman dan pemeliharaan barang milik daerah dan aspek fisik dan hukum.

6. Pengkoordinasikan dan pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah.

7. Pelaksanaan koordinasi melaksanakan pemusuhan milik

Edit dengan WPS Office

daerah.

8. Pelaksanaan koordinasi penghapusan barang milik daerah.

9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

10. Pelaksanaan tugas penunjang dan tugas bersifat rutinitas.

B. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data anggaran pendapatan belanja daerah dan realisasi di kantor keuangan daerah kota bukittinggi yang disajikan sebelumnya, dapat diketahui Untuk Menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran dalam APBD Kota Bukittinggi menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

1. Pendapatan

Tabel 4.1

Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio efektivitas (%)	Kriteria
2015	611.264.389.203.00	593.323.296.014.24	97,06	Efektif
2016	675.267.277.741.89	647.045.721.855.85	95,82	Efektif
2017	710.125.538.263.16	653.374.887.189.69	92,01	Efektif
2018	720.174.380.033.00	695.592.067.770.61	96,59	Efektif
2019	1.134.286.330.715	1.172.935.640.338	87,31	Cukup efektif

Sumber:Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2015-2019

Berdasarkan tingkat efektivitas anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi mencapai kriteria efektif dan cukup efektif. Secara keseluruhan tingkat, tingkat efektivitas pendapatan yang tertinggi yaitu pada tahun 2015 sebesar 97,06% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2015, realisasi Pendapatan sebesar Rp.593.323.296.014.24 dan target anggaran pendapatan sebesar

Edit dengan WPS Office

Rp.611.264.389.203.00.

Tingkat efektifitas anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan yang terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 87,31% dengan kriteria cukup efektifitas. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan sebesar Rp.1.172.935.640.338 dan target anggaran pendapatan sebesar Rp.1.134.286.330.715. meunjukkan hasil kinerja yang telah sesuai dengan yang di tetapkan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan kriteria efektif dan cukup efektif.

Tabel 4.2

Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan langsung	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi %%)	Kriteria
2015	66.027.359.716,34	593.323.296.014,34	104,66	Tidak efisien
2016	71.303.781.735,85	647.045.721.855,85	96,79	Kurang efisien
2017	102.375.931.332,69	653.374.887.189,69	90,26	Kurang efisien
2018	101.936.792.226,61	695.592.067.770.61	99,22	Kurang efisien
2019	111.896.596.611,05	1.172.935.640.338	95,3	Kurang efisien

Sumber:Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2015-2019

Edit dengan WPS Office

Berdasarkan Tingkat Efisiensi pada tahun 2015 104,66% menjadi 96,79% pada tahun 2016. Dari sudut pandang efisiensi perubahan ini dapat di pandang turunnya tingkat efisien, tetapi dalam kriteria kurang efisien. Pada tahun 2017 mengalami penurunan tingkat efisien menjadi 90,26% dan memiliki kriteri kurang efisien. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 99,22%.dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 95,3% .Secara keseluruhan anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan kantor badan keuangan kota bukittinggi tahun 2015-2019 masuk pada kategori kurang efisien. Unsur-unsur pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan langsung dan pendapatan. Semua unsur pendapatan realisasi melebihi anggaran yang ditetapkan.

Dengan hasil perhitungan dari tahun ke tahun pengukuran kinerja kurang efisien.[18]

Analisis Efektivitas dan Efisiensi dari pendapatan kantor badan keuangan bukittinggi pada tabel diatas adalah

Tabel 4.3
Analisis Tingkat Efektivitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan	97,06	95,82	92,01	96,59	87,31

[18]

Edit dengan WPS Office

Kriteria	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Cukup efektif
Rasio Efisiensi Anggaran Pendapatan	104,66	96,79	90,25	99,22	95,3
Kriteria	Tidak Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien

Sumber: Penulis,2021

2.Belanja

Tabel 4.4

Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio efektivitas (%)	Kriteria
2015	686.497.094.334,48	579.515.283.167.49	84,42	Efektiv
2016	740.530.417.595,22	631.173.276.618.00	85,23	Efektiv
2017	733.419.320.634.34	590.688.023.803,65	80,53	Kurang Efektiv
2018	839.898.354.079.22	705.251.103.983.95	83,97	Efektiv
2019	891.197.754.148.88	717.087.566.902.83	80,46	Kurang Efektiv

Sumber:Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2015-2019

Berdasarkan tingkat efektivitas anggaran Belanja dan realisasi Belanja Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi mencapai kriteria efektif dan cukup efektif. Secara keseluruhan tingkat, tingkat efektivitas Belanja yang tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 85,23% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2016, realisasi Belanja sebesar

Edit dengan WPS Office

Rp.631.173.276.618.00 dan target anggaran Belanja sebesar Rp740.530.417.595,22.

Tingkat efektifitas anggaran Belanja dan realisasi Belanja yang terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 80,46% dengan kriteria kurang efektifitas. Pada tahun 2019, realisasi balanja sebesar Rp.717.087.566.902.83 dan target anggaran belanja sebesar Rp.891.197.754.148.88. meunjukkan hasil kinerja yang telah sesuai dengan yang di tetapkan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan kriteria efektif dan kurang efektif.

Tabel 4.5

Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Belanja tidak langsung	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi %%)	Kriteria
2015	339.899.689.457,00	579.515.283.167.49	14,5	Sangat Efisien
2016	349.010.851.917,00	631.173.276.618.00	18,1	Sangat Efisien
2017	264.787.956.662,00	590.688.023.803.65	22.3	Sangat Efisien
2018	304.175.581.134,89	705.251.103.983.95	23,1	Sangat Efisien
2019	306.939.664.009,50	717.087.566.902.83	23,4	Sangat Efisien

Sumber:Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2015-2019

Berdasarkan Tingkat Efisiensi belanja pada tahun 2015 14,5% menjadi 18,1% pada tahun 2016. Dari sudut pandang efisiensi perubahan ini dapat di pandang penurunan tingkat efisien, tetapi dalam kriteria sangat efisien. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan tingkat efisien menjadi 22,3% dan memiliki kriteri sangat efisien. Pada tahun 2018 mengalami

Edit dengan WPS Office

kenaikan sebesar 23,1%.dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 23,4% .Secara keseluruhan anggaran belanja dan realisasi belanja kantor badan keuangan kota bukittinggi tahun 2015-2019 masuk pada kategori sangat efisien. Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja langsung. Semua unsur belanja realisasi tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.

Dengan hasil perhitungan dinilai bisa menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja dari tahun ke tahun. pengukuran kinerja menunjukkan sangat efisien.[19]

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran belanja Kantor badan Keuangan Bukittinggi pada tabel di atas adalah

Tabel 4.6

Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Efektivitas Anggaran Belanja	84,42	85,23	80,53	83,97	80,46
Kriteria	Efektif	Efektif	Kurang Efektif	Efektif	Kurang Efektif
Rasio Efisiensi Anggaran Belanja	14,5	18,1	22,3	23,1	23,4
Kriteria	Sangat Efisien	Sangat EFisien	Sangat Efisien	Sangat Efisien	Sangat Efisien

Sumber: Penulis,2021

19

Edit dengan WPS Office

3.Pembiayaan

Tabel 4.7

Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio efektivitas (%)	Kriteria
2015	75.232.705.131.48	75.060.344.066.48	99,77	Efektiv
2016	65.263.139.853.33	65.263.139.853.33	0,00	Tidak efektiv
2017	23.365.782.71.17	22.446.424.662.18	96,07	Efektiv
2018	119.723.947.046.22	105.574.316.787.22	88,18	Efektiv
2019	142.142.723.668.88	97.049.480.755.88	68,29	Kurang efektiv

Sumber:Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2015-2019

Berdasarkan tingkat efektivitas anggaran pembiayaan dan realisasi pembiayaan Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi mencapai kriteria efektif, tidak efektiv dan kurang efektif. Secara keseluruhan, tingkat efektivitas pembiayaan yang tertinggi yaitu pada tahun 2015 sebesar 99,77% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2015, realisasi pembiayaan sebesar Rp.75.060.344.066.48 dan target anggaran pembiayaan sebesar Rp75.232.705.131.48.

Tingkat efektifitas anggaran pembiayaan dan realisasi pembiayaan yang terendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 0.00% dengan kriteria tidak efektifitas. Pada tahun 2016, realisasi balanja sebesar Rp.65.263.139.853.33 dan target anggaran pembiayaan sebesar

Edit dengan WPS Office

Rp.65.263.139.853.33. meunjukkan hasil kinerja yang telah sesuai dengan yang di tetapkan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan kriteria efektif, tidak efektiv dan kurang efektif.

Tabel 4.8

Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi penerimaan pembiayaan daerah	Realisasi pembiayaan	Rasio Efisiensi %%)	Kriteria
2015	98.943.344.066.48	75.060.344.066.48	13,1	Sangat Efisien
2016	65.263.139.855.33	88.463.139.853.33	13,5	Sangat Efisien
2017	79.573.559.561.18	22.446.424.662.18	0,35	Sangat Efisien
2018	105.574.316.787.22	110.574.361.787.22	7,09	Sangat Efisien
2019	88.500.322.792.00	97.049.480.755.88	0,10	Sangat Efisien

Sumber:Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2015-2019

Berdasarkan Tingkat Efisiensi pembiayaan pada tahun 2015 13,1% menjadi 13,5% pada tahun 2016. Dari sudut pandang efisiensi perubahan ini dapat di pandang penurunan tingkat efisien, tetapi dalam kriteria sangat efisien. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan tingkat efisien menjadi

Edit dengan WPS Office

0,35% dan memiliki kriteri sangat efisien. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 7,09%.dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,10% .Secara keseluruhan Pembiayaan dan realisasi kantor badan keuangan kota bukittinggi tahun 2015-2019 masuk pada kategori sangat efisien. Unsur-unsur Pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pembiayaan. Semua unsur belanja realisasi tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.

Dengan hasil perhitungan dinilai bisa menghemat dana dalam pengelolaan anggaran pembiayaan dari tahun ke tahun. pengukuran kinerja menunjukkan sangat efisien.[20]

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran belanja Kantor badan Keuangan Bukittinggi pada tabel di atas adalah

Tabel 4.9

Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Efektivitas Anggaran Pembiayaan	99,77	0,00	96,07	88,18	68,29
Kriteria	Efektif	Tidak Efektif	Efektif	Efektif	Kurang Efektif
Rasio Efisiensi Anggaran	13,1	13,5	0,35	7,09	0,10

20

Edit dengan WPS Office

Pembiayaan					
Kriteria	Sangat Efisien	Sangat EFisien	Sangat Efisien	Sangat Efisien	Sangat Efisien

Sumber: Penulis,2021

Berdasarkan Analisis efektivitas pada **tabel 4.3, 4.6, dan 4,9.** diatas yang penulis uraikan dapat dilihat bahwa:

1. Efektivitas pendapatan anggaran kantor keuangan kota bukittinggi pada tahun 2015 97,06% (Efektif). Kemudian ditahun 2016, tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 95,82% (Efektif). Kemudian tahun 2017, tingkat Efektifitas kembali mengalami penurunan menjadi 92,01% (Efektif). Di tahun 2018, tingkaat efektifitas mengalami kenaikan menjadi 96,59% (Efektif). Dan di tahun terakir 2019, tingkat Efektivitas kembali menurun menjadi 87,31% (Cukup Efektif).
2. Efektivitas anggaran Belanja kantor keuangan kota bukittinggi pada tahun 2015 84,42% (Efektif). Kemudian di tahun 2016, tingkat efektivitas mengalami kenaikan menjadi 85,23% (Efektif). Tahun 2017, tingkat efektifitas mengaalami penurunan menjadi 80,53% (kurang Efektiv). Di tahun 2018, tingkat efektivitas naik menjadi 83,97% (Efektif). Dan terakir tahun 2019, tingkat efektivitas kembali turun menjadi 80,46%(Kurang Efektiv).
3. Efektivitas anggaran Pembiayaan/transfer kantor keuangan kota bukittinggi pada tahun 2015 99,77% (Efektif). Kemudian di tahun 2016, tingkat efektivitas mengalami penurunan 0,00% (tidak Efektif). Tahun 2017, tingkat efektifitas mengaalami kenaikan menjadi 96,07% (Efektiv). Di tahun 2018, tingkat efektivitas turun menjadi 88,18% (cukup Efektif). Dan terakir tahun 2019, tingkat efektivitas kembali turun menjadi 68,29% (Kurang Efektiv).[21]

Analisis Efektivitas pendapatan anggaran kantor badan keuangan kota bukittinggi dihitung dengan membandingkan antara anggaran

[21]

Edit dengan WPS Office

pendapatan yang telah ditetapkan dengan anggaran realisasi dari tahun 2015 sampai 2019 dan hasil perhitungan berfluktulasi disetiap tahunnya. Dengan demikian dari tahun 2015-2019 anggaran pendapatan belanja daerah kota bukittinggi sudah efektiv dalam menjalankan tugasnya karena besarnya realisasi pendapatan belanja daerah yang dicapai semakin meningkat.

Dan berdasarkan Analisis Efisiensi pada **tabel 4.3, 4.6, dan 4.9** diatas dilihat bahwa :

1. Efisiensi pendapatan anggaran kantor badan keuangan kota bukittinggi tahun 2015, 104,66% (tidak efisien)., kemudian tahun 2016, sebesar 96,79% (Kurang efisien). Tahun 2017, sebesar 90,25% (kurang efisien). Selanjutnya tahun 2018, sebesar 99,22% (kurang Efisien). Dan terakir tahun 2019, sebesar 95,3% (kurang efisien).
2. Efisiensi anggaran belanja kantor badan keuangan kota bukittinggi tahun 2015, 14,5% (sangat efisien)., kemudian tahun 2016, sebesar 18,1% (sangat efisien). Tahun 2017, sebesar 22,3% (sangat efisien). Selanjutnya tahun 2018, sebesar 23,1% (sangat Efisien). Dan terakir tahun 2019, sebesar 23,4% (sangat efisien).
3. Efisiensi anggaran pembiayaan/transfer kantor badan keuangan kota bukittinggi tahun 2015, 13,1% (sangat efisien)., kemudian tahun 2016, sebesar 13,5% (sangat efisien). Tahun 2017, sebesar 0,35% (sangat efisien). Selanjutnya tahun 2018, sebesar 7,09% (sangat Efisien). Dan terakir tahun 2019, sebesar 0,10% (sangat efisien).

Analisis Efisiensi anggaran pendapatan belanja daerah kota bukittinggi dihitung dengan membandingkan antara tingkat realisasi anggaran langsung dan realisasi anggaran belanja tahun 2015-2019 dan berdasarkan hasil perhitungan berfluktulasi setiap tahun. Dimana tingkat realisasi anggaran yang dimaksud adalah total dari pendapatan langsung dan realisasi pendapatan, belanja langsung dan belanja tidak langsung, penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi pembiayaan, maka peneliti

Edit dengan WPS Office

harus berpatokan dalam hal biaya. dimana efisiensi hanya ditentukan oleh ketetapan dalam mendayagunakan anggaran pendapatan belanja dengan memberi prioritas pada faktor-faktor input yang mengacu pada pencapaian tujuan. [22]

Efektivitas dan Efesiensi Penyerapan Anggaran Belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan anggaran suatu daerah, untuk dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal. Hasil perhitungan mengenai tingkat Efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kantor badan keuanga kota bukittinggi untuk tahun 2015-2019 suda menunjukkan kriteria yang efisien. Secara melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Dengan hasil perhitungan dari tahun ke tahun di kantor keuangan bukittinggi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah bisa menghemat dana dalam pengelolaan anggaran. Untuk perhitungan mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja setiap tahunnya kriteria efektif dan cukup efektif, untuk tahun 2015-2018 mencapai kriteria efektiv. Sedangkan untuk tahun 2019 mencapai kriteria cukup efektif.

Tingkat efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah kota bukittinggi sudah di kategorikan Efektiv dan efisien dan kinerja pelaksanaan anggaran sudah berhasil.[23]

BAB V

PENUTUP DAN SARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran dalam APBD Kota Bukittinggi sudah maksimal dan dapat dilihat dari hasil pengukuran efektivitas dan efisiensi sebagai berikut :

[22] Pemikiran penulis
[23] ibid

Edit dengan WPS Office

1. Efektivitas

Efektivitas Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Bukittinggi . Rasio efektivitas anggaran pendapatan belanja dari tahun 2015 rasio efektivitas nya sebesar 99,77% , tahun 2016 rasio efektivitasnya sebesar 95,82%, tahun 2017 rasio efektivitasnya sebesar 96,07%, tahun 2018 rasio efektivitasnya sebesar 96,59%, dan tahun 2019 rasio efektivitasnya sebesar 87,31%. Tingkat efektivitas anggaran pendapatan belanja setiap tahunnya sudah efektiv karena hasilnya yang dicapai adalah 90% keatas.

2. Efisiensi

Rasio efesiensi anggaran pendapatan dan belanja dari tahun 2015 rasio efisiensi sebesar 13,1%, tahun 2016 sebesar 13,5%, tahun 2017 sebesar 0,35%, tahun 2018 sebesar 7,09% dan tahun 2019 sebesar 0,10%. Tingkat efisien anggaran pendapatan belanja daerah merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang digunakan.

B.Saran

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi instansi terkait dan penelitian selanjutnya.

1. peneliti selanjutnya dapat menambah atau mencoba variabel yang lebih relevan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja.

2. selain menggunakan metode deskriptif peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan metode explanatory atau kedudukan antara variabel yang satu dengan yang lain dengan tujuan sampel penelitian yang lebih banyak.

3. Kantor Badan Keuangan Bukittinggi diharapkan dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengembangkan pembangunan dan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah agar bisa lebih efektiv dan efisien

Edit dengan WPS Office

setiap tahunnya.

Edit dengan WPS Office

DAFTAR PUSTAKA

-Mufdhatul, 2010, **" Analisis Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD: Kasus APBD**, Tahun 2008 dan 2009", Akuntansi Manajemen, Vol, 18, No 1 : 43-50.

-Rudy, 2011, "**Pengaruh Belanja ppada Anggaran Pendapatan BElanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masysarakat** Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah", akuntansi dan manajemen, Vol, 22, No 1:39-66

-Ariel Sharon sumenge.2013. Analisis **Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Minahasa selatan. Jurnal EMBA**.Vol.1 No 3 September 2013.

Hal.74-81. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

-Bastian Indra.2010.**Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga.**

Erlangga:Jakarta.

-Haruman dan Sri Rahayu.2010.Penyusunan Anggaran" edisi pertama, Salemba Empat: Jakarta.

Edit dengan WPS Office

-Halim Abdul dan Kusufi.2012.**Akuntansi Keuangan Daerah.**edisi Empat selemba empat:Jakarta

-Julita dan Jufrizen,2012.**Budgeting.**penerbit Citapustaka media perintis. Bandung.

-Kikiy Muryanti.2017.**Analisis realisasi Anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah wonogiri tahun anggaran 2011-2015.** Surakarta

-Joa amaral,**Efektivitas penyerapan Anggaran,**Jurnal Ekonomi dan bisnis . Udayana

- Murdani, Ade Suherlan 2014 **, Jurnal Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Dalam APBD Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2018-2012.**

- Alimudin Firman, 2018" **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral kabupaten pinrang**," Vol. 1 No 1 (2018) Oktober.

- Basariah Siti,2015 **" Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah"** Vol 5 nomor 6, juni 2017 hlm 63-74.

- Bastian Indra, 2009 Akuntansi Sektor Publik Indonesia nNo,008.

- Halim Abdul, 2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat Salemba.

- Julita, SE,M. Si, 2012." Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara".

- Nordiawan Deddi, 2011. Edisi 2 Akuntansi Sektor Publik, Jakarta : salemba Empat

Edit dengan WPS Office

Edit dengan WPS Office